

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

1.1. Kondisi Geografis dan Iklim



- Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur.
- Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTT memiliki batas-batas: Utara - Laut Flores, Selatan – Samudera Hindia, Timur - Negara Timor Leste, Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores.
- Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 Kota yang terletak di tujuh pulau besar, yaitu:

Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah.

Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka dan Kota Kupang.

Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur.

Pulau Alor: Alor

Pulau Lembata: Lembata

Pulau Rote: Rote Ndao

Pulau Sabu: Sabu Raijua

- Luas wilayah daratan 4.734.990 ha tersebar pada 1.192 pulau (43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni).
- Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah.
- Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 - 118 kilometer.
- Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni - September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 bulan (Januari s.d

Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

1.2. Demografi

- Penduduk Usia Kerja Tahun 2019
(PUK 15 Th +) : 3.617.139 orang
- Angkatan Kerja (AK) : 2.477.703 orang
- Bukan Angkatan Kerja (BAK) : 1.139.436 orang
- Bekerja : 2.394.673 orang
- Penganggur Terbuka : 83.030 orang
- Setengah Penganggur : 1.112.019 orang
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%): 68,50
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 3,35
- Tingkat Kesempatan Kerja (%) : 96,65

2. Permasalahan di Bidang Koperasi dan UKM

Permasalahan umum dibidang koperasi dan UKM adalah rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM menjadi salah satu tantangan pengembangan produk Koperasi dan UKM NTT, berkembangnya bisnis ritail oleh pengusaha besar saat ini menjadikan produk Koperasi dan UKM semakin terhimpit, disatu sisi keberadaan UKM membutuhkan kepastian tempat usaha, dengan keterbatasan yang dimiliki Koperasi dan UKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah.

Selain itu rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM, terlebih Koperasi dan UKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas, kebanyakan Koperasi dan UKM hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal.

3. Permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan umum yang terjadi di bidang ketenagakerjaan adalah: tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, rendahnya tingkat upah, kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja yang masih rendah, maraknya Calon TKI yang berangkat secara non prosedural dan lain-lain.

4. Permasalahan di Bidang Ketrasmigrasian

Permasalahan umum yang menjadi dasar untuk penatalaksanaan kebijakan dan program ketrasmigrasian di Nusa Tenggara Timur antara lain :

- 4.1. Sebagian besar lahan usaha di Nusa Tenggara Timur adalah lahan kering dan marginal.
- 4.2. Kepemilikan lahan oleh sebagian besar masyarakat terbatas.
- 4.3. Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing daerah di Nusa Tenggara Timur tidak merata, ada beberapa daerah yang berkepadatan penduduk tinggi sementara bagian yang lain berkepadatan penduduk rendah.

BAB II

PENJELASAN TEKNIS

2.1. Metode

2.1.1. Pengumpulan Data

Data makro perekonomian dan ketenagakerjaan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai publikasi BPS seperti SAKERNAS.

Data mikro ketenagakerjaan, data koperasi, UKM dan ketransmigrasian merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari Dinas Kopnakertrans Prov. NTT, UPTD Pelatihan Kerja, BNP3TKI, dan dikumpulkan dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten/Kota.

2.1.2. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dikompilasi dan diolah dengan menggunakan tabulasi untuk kemudian disajikan berdasarkan provinsi, kabupaten/kota, sektor, golongan umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

2.2. Ruang Lingkup Penyajian

Informasi koperasi dan UKM disajikan berdasarkan data yang relevan mengenai koperasi dan UKM yang ada yaitu jumlah koperasi aktif, koperasi tidak aktif, jumlah anggota, asset, volume usaha dan sebaran UKM yang ada di Provinsi NTT berdasarkan skala usaha beserta asset dan omsetnya.

Informasi ketenagakerjaan yang disajikan dibatasi dengan jenis data yang relevan dan berhubungan langsung dengan aspek-aspek pengembangan ketenagakerjaan meliputi penduduk, penduduk usia kerja, angkatan kerja, orang yang bekerja, pencari kerja, Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial, dan Perlindungan serta Pengawasan Ketenagakerjaan.

Informasi ketransmigrasian yang disajikan menyangkut jumlah Unit Permukiman Transmigrasi yang dibangun serta penempatan transmigrasi.

2.3. Konsep dan Definisi

2.3.1. Konsep dan Definisi Koperasi dan UKM

- a. Koperasi adalah suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi.

Pengertian koperasi lainnya adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan.

- b. UKM adalah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

2.3.2. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan:

- a. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

- b. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- c. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan lebih) yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
- d. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
- e. Penganggur Terbuka terdiri dari :
- Mereka yang mencari pekerjaan/pencari kerja.
 - Mereka yang mempersiapkan usaha.
 - Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
 - Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
- f. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.
- g. Setengah penganggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, baik masih bersedia menerima pekerjaan (setengah penganggur terpaksa), maupun mereka yang tidak bersedia menerima pekerjaan lagi (setengah penganggur sukarela).
- h. Setengah Penganggur Terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.

- i. Setengah Penganggur Sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.
- j. Jenis kegiatan/lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja, seperti digolongkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).
- k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja.
- l. Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Regional Provinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- m. Menurut Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu Regional Provinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- n. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal, (4) perubahan stock dan (5) ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2.3.3. Konsep dan Definisi Ketrasmigrasian:

- a. Ketrasmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

- b. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- c. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
- d. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.
- e. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- f. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- g. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
- h. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.

- i. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
- j. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
- k. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

BAB III
PROFIL KANTOR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1. Dasar Hukum Berdirinya Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 4 (Empat) orang Kepala Bidang dan 1 orang Kepala UPT, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi pengawasan, dan
 - c. Seksi Penilaian Kesehatan dan Pemeringkatan.
3. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas:
 - a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan
 - c. Seksi Pengembangan, Promosi Koperasi dan Usaha Kecil.
4. Bidang ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan Pengupahan dan Jaminan Sosial, dan

- c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Seksi Pembinaan Sosial, Budaya dan Ekonomi, dan
- c. Seksi Penempatan, Pemindahan dan Sarana Prasarana.

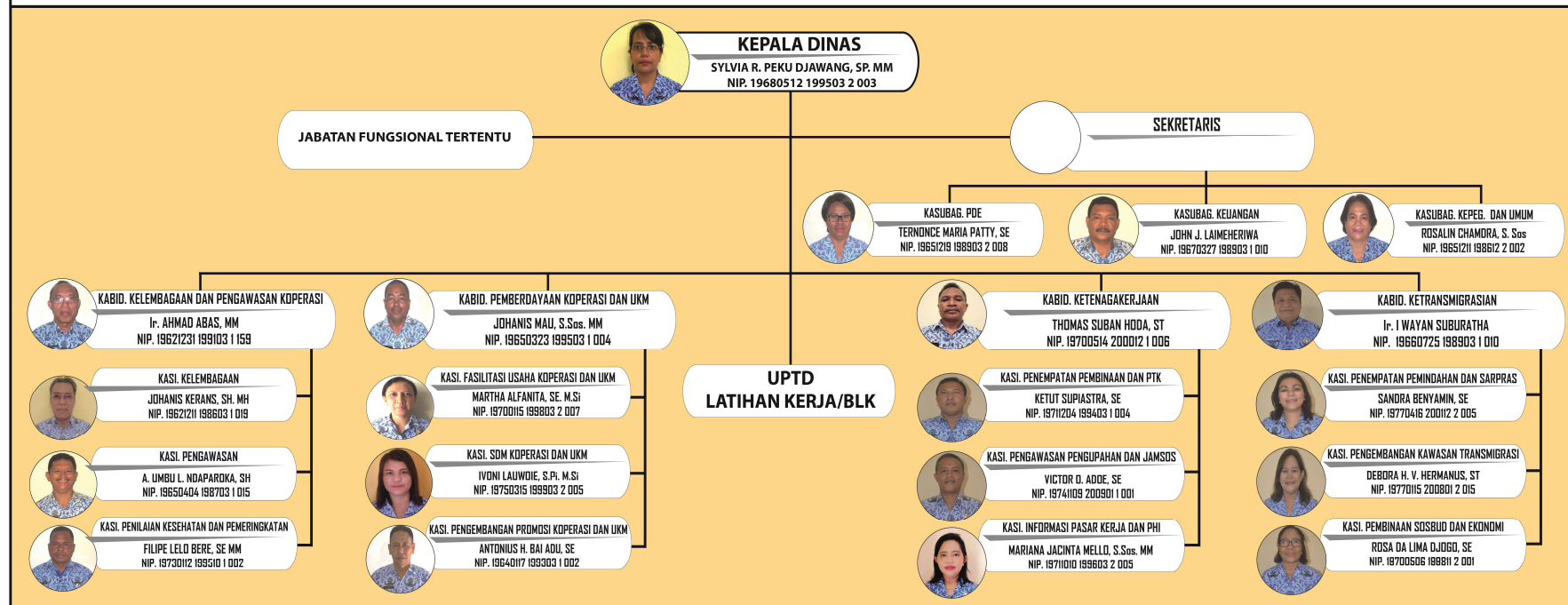
6. UPTD Latihan Kerja, terdiri atas:

- a. Sub Bagian tata Usaha;
- b. Kepala Seksi pelatihan dan Promosi, dan
- c. Kepala Seksi Pengembangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Peraturan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor: 10 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 10 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 JANUARI 2019

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap persoalan ketenagakerjaan di Provinsi NTT, melakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi keahlian. Secara teknis, pelatihan tenaga kerja diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Latihan Kerja (UPTD LK).

Lembaga Pelatihan Kerja ini sebelum otonomi daerah merupakan unit vertikal dibawah naungan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bapak Soedomo pada tahun 1984 dengan nomenklatur: Balai Latihan Kerja Kupang.

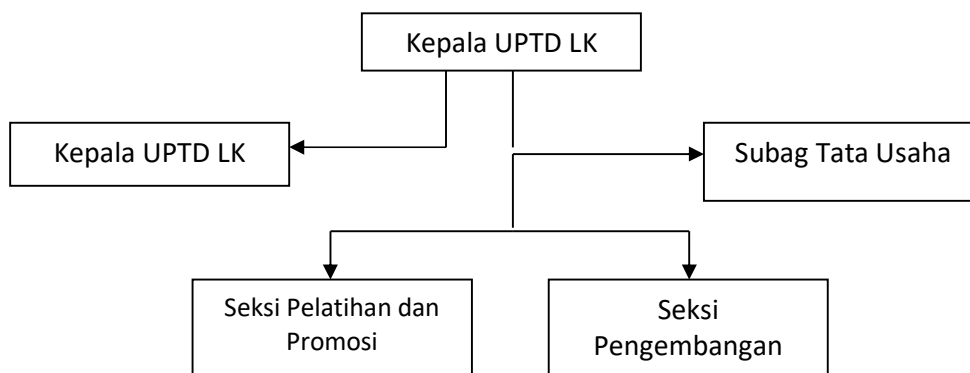
Setelah diberlakukan otonomi daerah, terjadi perubahan sistem pembinaan Balai Latihan Kerja dari sentralisasi ke desentralisasi (UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah) yang mengakibatkan hampir seluruh Balai Latihan yang semula dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Dengan demikian beban pembiayaan operasional Balai Latihan Kerja termasuk biaya pelatihan dan perawatannya menjadi beban pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai satu lembaga pelatihan milik pemerintah Provinsi yaitu UPT Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2008. Menurut Peraturan Gubernur tersebut, tugas pokoknya melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas Nakertrans Provinsi NTT dibidang peningkatan kualitas sumber daya masyarakat.

Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019, lembaga itu berubah menjadi UPTD Latihan Kerja merupakan salah satu Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah yang bernaung dibawah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mempunyai peranan penting dan strategis untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pasar kerja. Pelatihan tenaga kerja berperan sebagai jembatan

kebutuhan pasar kerja dengan kemampuan angkatan kerja (Undang-Undang Nomor 13 : 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Struktur Organisasi UPTD Latihan Kerja Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT



3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tugas pokok Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 3.2.1 Perumusan kebijakan di bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi;
- 3.2.2 Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi;
- 3.2.3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, tenaga Kerja dan transmigrasi;
- 3.2.4 Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi;
- 3.2.5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Uraian Tugas Unit Eselon III

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan maka uraian tugas Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

3.3.1. Sekretariat

Rumusan Tugas Sekretariat adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3.3.2. Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi

Rumusan Tugas Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perizinan dan kelembagaan , pengawasan dan pemeriksaan koperasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertibnya pengelolaan organisasi dan tatalaksana koperasi.

3.3.3. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rumusan Tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan koperasi dan ukm meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, fasilitasi usaha kecil dan pengembangan, penguatan serta perlindungan usaha kecil serta peningkatan kualitas kewirausahaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pemberdayaan koperasi dan ukm secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

3.3.4. Bidang Ketenagakerjaan

Rumusan Tugas Pokok Bidang Ketenagakerjaan adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, pengupahan, jaminan sosial, informasi pasar kerja dan pembinaan hubungan industrial meliputi syarat kerja, dan perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dan terciptanya ketenangan dalam bekerja.

3.3.5. Bidang Ketransmigrasian

Rumusan Tugas Bidang Ketransmigrasian adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi, penempatan, pemindahan, dan sarana prasarana, pembinaan sosial budaya dan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi dan sekitarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung wilayah transmigrasi.

3.3.6. UPT Pelatihan Tenaga Kerja

Rumusan Tugas UPT Pelatihan Tenaga Kerja adalah merencanakan operasional, mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi, serta menyelenggarakan ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja meliputi pelatihan berbasis masyarakat, Mobil Training Unit (MTU), uji kompetensi, pemasaran lulusan, fasilitas pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya tenaga kerja yang produktif dan profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri.

3.4. Personil

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Desember 2020 sebanyak 199 orang dengan rincian sebagai berikut:

3.4.1. Menurut Unit Kerja:

- Kantor Dinas : 157 orang;
- UPT PTK Kupang : 42 orang;

3.4.2. Menurut Jenis Kelamin:

- Laki – Laki : 126 orang;
- Perempuan : 73 orang;

3.4.3. Menurut Golongan:

- Golongan IV : 20 orang;
- Golongan III : 152 orang;
- Golongan II : 27 orang;
- Golongan I : 0 orang.

3.4.4. Menurut Pendidikan:

- S2 : 22 orang;
- S 1 : 108 orang;
- Sarmud / D 3 : 15 orang;
- SLTA : 54 orang;
- SLTP : 0 orang;
- SD : 0 orang.

3.4.5. Menurut Agama:

- Islam : 12 orang;
- Protestan : 122 orang;
- Katholik : 60 orang;
- Hindu : 5 orang;

3.4.6. Status Perkawinan:

- Kawin : 193 orang;
- Belum Kawin : 6 orang;

3.4.7. Jabatan:

- Eselon II : 1 orang;
- Eselon III : 5 orang;
- Eselon IV : 18 orang;
- Fungsional : 47 orang;
- Fungsional Umum : 121 orang.

3.5. Visi

Visi pembangunan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 – 2023 sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu:

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3.6. Misi

Berdasarkan Visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan misi ke-1 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.

3.7. Program Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terdapat beberapa program unggulan dengan mengacu pada program Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kemenaker RI dan Kemendes, PDT dan Transmigrasi maupun RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program-program tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

3.7.1. Dekonsentrasi untuk program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas;

- b. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- d. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi.

3.7.2. Tugas Pembantuan terutama untuk program ketransmigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

3.7.3. APBD untuk Program Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Program NTT Bangkit.

BAB IV

DATA UMUM KETENAGAKERJAAN

Dalam Profil Ketenagakerjaan ini antara lain disajikan data umum ketenagakerjaan yang bersumber dari data makro sekunder hasil survei Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Setengah Penganggur dan Penganggur Terbuka yang diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional periode bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan 2018.

4.1. Profil Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja yang seringkali disingkat sebagai PUK, adalah penduduk berumur 15 tahun keatas atau disebut juga tenaga kerja.

Penduduk Usia Kerja di Nusa Tenggara Timur mengalami perkembangan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 penduduk usia kerja mencapai 3.471.717 orang, pada tahun 2018 berjumlah 3.543.119 orang dan pada Tahun 2019 berjumlah 3.617.139 orang, dengan demikian selama periode 3 (tiga) tahun telah terjadi peningkatan 145.422 orang dengan tingkat pertumbuhan 2,07 % rata-rata per tahun.

Penduduk Usia Kerja Terdiri dari Angkatan kerja dan Bukan Angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebanyak 79.094 orang, yaitu dari 2.398.609 orang pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.477.703 pada tahun 2019 atau dengan rata-rata pertumbuhan 1,64 % rata-rata per tahun. Disisi lain kelompok bukan angkatan kerja selama 3 (tiga) tahun juga terjadi peningkatan sebesar 66.328 orang, yaitu dari 1.073.108 orang pada tahun 2017 menjadi 1.139.436 orang pada tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 3,04 %.

Walaupun angkatan kerja meningkat 1,64 % per tahun, namun kelompok Bukan Angkatan Kerja juga meningkat lebih tinggi dengan rata-rata

Pertumbuhan 3,04 %, dampaknya nampak pada penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,09 % pada tahun 2017 menjadi 68,50 % pada tahun 2019.

Tingkat pengangguran terbuka cenderung fluktuatif, yaitu menurun pada tahun 2018 dan naik pada tahun 2019.

TABEL 4.1.
PENDUDUK USIA KERJA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT KEGIATAN TAHUN 2017 - 2019

KEGIATAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
ANGKATAN KERJA	2.398.609	2.486.281	2.477.703
BEKERJA	2.320.061	2.411.533	2.394.673
PENGANGGUR	78.548	74.748	83.030
BUKAN ANGKATAN KERJA	1.073.108	1.056.838	1.139.436
SEKOLAH	452.426	388.407	427.553
MENGURUS RUMAH TANGGA	504.657	547.798	563.451
LAINNYA	116.025	120.633	148.432
PENDUDUK USIA KERJA	3.471.717	3.543.119	3.617.139
TPAK (%)	69,09	70,17	68,50
TPT (%)	3,27	3,01	3,35
TKK (%)	96,73	96,99	96,65

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2019, diolah Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

Keterangan :

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT = Tingkat Penganggur Terbuka

TKK = Tingkat Kesempatan Kerja

4.2. Profil Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, yaitu dari 2.398.609 orang pada tahun 2017 meningkat menjadi

2.486.281 pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2019 menjadi 2.477.703 atau dengan rata-rata pertumbuhan 1,64 % rata-rata per tahun.

Angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SD Kebawah, yaitu pada tahun 2017 sebesar 56,65 %, dan tahun 2019 sebesar 51,35 %. Demikian juga dengan proporsi Angkatan Kerja dengan pendidikan SMP mengalami fluktuasi sedangkan SMA mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran dan kemampuan masyarakat didalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat dan juga karena penyediaan fasilitas pendidikan yang semakin meningkat pula.

TABEL 4.2.
ANGKATAN KERJA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENDIDIKAN
TAHUN 2017 - 2019

PENDIDIKAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
≤ SD	1.358.751	1.381.142	1.272.359
SMTp	315.762	306.890	312.591
≥ SMTA	724.096	798.249	892.753
JUMLAH	2.398.609	2.486.281	2.477.703

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2019, diolah Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

4.3. Profil Penduduk Yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 2.320.061 orang dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.394.673 orang atau bertambah sebanyak 74.612 orang atau mengalami pertumbuhan 1,60 % rata-rata per tahun.

4.3.1. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD kebawah yaitu sekitar 57,92 %, disusul berpendidikan SMTA keatas sebesar 28,78 %, dan SMTP sebesar 13,30 %.

Dilihat dari perkembangannya selama tiga tahun terakhir, maka mereka yang berpendidikan SMTA keatas mengalami perkembangan yang paling tinggi yaitu bertumbuh 11,41 % rata-rata per tahun disusul berpendidikan SMP bertumbuh -0,5 %, dan SD sebesar -3,15 %.

TABEL 4.3.1.
PENDUDUK YANG BEKERJA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENDIDIKAN
TAHUN 2017 - 2019

PENDIDIKAN	TAHUN					
	2017		2018		2019	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
≤SD	1.343.766	57,92	1.369.339	56,78	1.260.474	52,64
SMTP	308.646	13,30	301.438	12,50	305.541	12,76
≥ SMTA	667.649	28,78	740.756	30,72	828.658	34,60
JUMLAH	2.320.061	100,00	2.411.533	100,00	2.394.673	100,00

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2019, diolah Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

Semakin menurunnya orang yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD Kebawah dan meningkatnya mereka yang berpendidikan SMTA keatas menggambarkan semakin meningkatnya tingkat pendidikan kaum pekerja di NTT dari tahun ketahun, dan hal tersebut diharapkan

akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dunia usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.3.2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Deskripsi jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan cerminan struktur pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selain itu juga mencerminkan tingkat kemajuan perekonomian suatu wilayah dan kontribusi sektoral dalam penciptaan kesempatan kerja dan penyerapannya.

TABEL 4.3.2
PENDUDUK YANG BEKERJA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2017 - 2019

LAPANGAN USAHA	TAHUN					
	2017		2018		2019	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	1.271.534	54,81	1.319.772	54,73	1.166.258	48,70
2. Pertambangan dan penggalian	23.323	1,01	29.922	1,24	25.343	1,06
3. Industri pengolahan	205.314	8,85	216.175	8,96	244.256	10,20
4. Listrik, gas dan air	8.536	0,37	11.095	0,46	9.101	0,38
5. Bangunan	97.965	4,22	106.751	4,43	135.358	5,65
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	237.329	10,23	252.369	10,47	293.423	12,25
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi	102.245	4,41	104.385	4,33	113.695	4,75
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	35.197	1,52	32.808	1,36	33.031	1,38
9. Jasa kemasyarakatan	338.618	14,60	338.256	14,03	374.208	15,63
JUMLAH	2.320.061	100,00	2.411.533	100,00	2.394.673	100,00

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2019, diolah Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

Proporsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian relatif masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya, dimana proporsinya mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, yaitu dari 54,81 % pada tahun 2017 menjadi 54,73 % pada tahun 2017 dan tahun 2019 menjadi 48,70 %. Dengan kata lain orang yang bekerja di sektor pertanian jumlahnya mengalami penurunan sebanyak 105.276 orang dengan rata-rata pertumbuhan – (minus) 4,23 %. Tenaga kerja pertanian masih menjadikan sektor ini sebagai basis untuk mencari pekerjaan pada sektor lainnya, apalagi kesempatan kerja disektor modern masih belum menunjukkan peluang yang menggembirakan. Apabila mereka mendapatkan pekerjaan pada sektor lainnya maka sektor pertanian cenderung ditinggalkan, sebaliknya jika mereka tidak berhasil masuk ke sektor lainnya, maka mereka kembali ke sektor pertanian.

Sektor lain yang mengalami penurunan adalah sektor Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan – (minus) 2.166 orang selama periode 2017–2019 dengan rata-rata pertumbuhan – (minus) 3,13 %.

Sektor-sektor lain yang menunjukkan kondisi membaik dan meningkat penyerapan tenaga kerjanya antara lain adalah perdagangan, industri pengolahan, keuangan, listrik, pertambangan dan bangunan.

4.3.3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Deskripsi mengenai penduduk yang bekerja menurut Status Pekerjaan Utama adalah dalam rangka melihat kedudukan seseorang atau posisi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan di suatu unit produksi barang atau jasa. Untuk kepentingan analisis, penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dikelompokkan kedalam status formal dan informal.

Yang termasuk kedalam status formal adalah berusaha dengan buruh tetap dan pekerja/buruh/karyawan. Sedangkan yang masuk kelompok status informal adalah berusaha mandiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tidak dibayar.

TABEL 4.3.3
PENDUDUK YANG BEKERJA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT STATUS PEKERJAAN
TAHUN 2017 - 2019

STATUS PEKERJAAN	TAHUN					
	2017		2018		2019	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1. Berusaha sendiri	442.892	19,09	420.265	17,43	479.219	20,01
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	643.982	27,76	675.681	28,02	623.157	26,02
3. Berusaha dibantu buruh tetap	48.608	2,10	47.571	1,97	54.766	2,29
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	511.558	22,05	530.134	21,98	602.416	25,16
5. Pekerja bebas di Pertanian	39.335	1,70	43.572	1,81	37.741	1,58
6. Pekerja bebas di Non Pertanian	49.596	2,14	55.087	2,28	58.628	2,45
7. Pekerja tidak dibayar	584.090	25,18	639.223	26,51	538.746	22,50
JUMLAH	2.320.061	100,00	2.411.533	100,00	2.394.673	100,00

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2019, diolah Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

Jumlah pengusaha di Nusa Tenggara Timur (mereka yang berstatus Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap), cenderung menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu sebanyak 1.135.482 orang (48,94 %) pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.143.517 orang (47,42 %) pada tahun 2018 dan naik pada tahun 2019 menjadi 1.157.142 orang (48,32 %) dengan tingkat pertumbuhan 0,95 % rata-rata per tahun. Hal ini menggambarkan

bahwa potensi ekonomi di Nusa Tenggara Timur dianggap cukup menjanjikan dan mengindikasikan adanya peluang untuk berusaha.

Kondisi lain yang cukup menggembirakan adalah adanya peningkatan jumlah mereka yang pekerja bebas di non pertanian yaitu jumlahnya dari 49.596 orang (2,14 %) pada tahun 2017 menjadi 58.628 orang (2,45 %) pada tahun 2019 atau selama tiga tahun meningkat sebesar 9.032 orang dengan rata-rata pertumbuhan 8,72 % rata-rata per tahun.

4.3.4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja

Perekonomian Nusa Tenggara Timur yang mulai mengalami perbaikan ternyata juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerja rakyatnya yang semakin bergairah. Indikasi ini terlihat dari produktivitas dunia usaha apabila dilihat dari sisi jam kerja cukup menunjukkan perbaikan. Pada periode 2017 sampai dengan 2019 jumlah penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal (1-34 Jam seminggu) atau biasa disebut bekerja tidak penuh atau setengah penganggur proporsinya meningkat yaitu dari 44,79 % pada tahun 2017 naik menjadi 46,44 % pada tahun 2019. Disisi lain penduduk yang bekerja diatas jam kerja normal (lebih dari 35 Jam seminggu) atau biasa disebut bekerja penuh, mengalami penurunan yaitu dari 55,21 % pada tahun 2017 turun menjadi 53,56 % pada tahun 2019.

Secara absolut jumlah setengah penganggur pada tahun 2017 sebanyak 1.039.240 orang naik pada tahun 2019 menjadi 1.112.019 orang atau naik 3,44 % rata-rata per tahun. Sementara penduduk yang bekerja penuh pada tahun 2017 sebanyak 1.280.821 orang, pada tahun 2019 naik menjadi 1.282.654 orang atau naik 0,07 % rata-rata per tahun.

TABEL 4.3.4
PENDUDUK YANG BEKERJA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT JAM KERJA
TAHUN 2017 - 2019

JAM KERJA	TAHUN					
	2017		2018		2019	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
0 -34	1.039.240	44,79	1.170.784	48,55	1.112.019	46,44
≥35	1.280.821	55,21	1.240.749	51,45	1.282.654	53,56
JUMLAH	2.320.061	100,00	2.411.533	100,00	2.394.673	100,00

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2019, diolah Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

4.4. Profil Penganggur Terbuka

Yang dimaksudkan Penganggur Terbuka adalah terdiri dari: (a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan (d) Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Jumlah penganggur terbuka di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebanyak 78.548 orang dan pada tahun 2019 naik menjadi 83.030 orang atau bertambah sebanyak 4.482 orang. Sementara Tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik dari 3,27 % pada tahun 2017 menjadi 3,35 % pada tahun 2019.

4.4.1. Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan

Jumlah penganggur dilihat menurut tingkat pendidikan, pada tahun 2017, menunjukkan fenomena yang menarik, dimana jumlah penganggur terbuka tertinggi justru pada kelompok pendidikan diatas SMTA menyusul SD dan terkecil SMP. Apabila kita lihat jumlahnya dari tahun 2017 sampai dengan 2019 pada tingkat

pendidikan SD dan SMTP mengalami fluktuasi, sedangkan untuk berpendidikan diatas SMTA cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya mismatch antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.

Apabila kita lihat jumlah Pengangguran Terbuka pada tahun 2019, maka penganggur terbuka tertinggi justru pada penganggur pada tingkat pendidikan diatas SMTA sebesar 77,19 %, disusul SD Kebawah 14,31 %, dan terkecil SMP sebesar 8,49 %. Artinya tingkat pendidikan yang semakin tinggi ternyata tidak menjamin seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup.

TABEL 4.4.1
PENGANGGUR TERBUKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENDIDIKAN
TAHUN 2017 - 2019

PENDIDIKAN	TAHUN					
	2017		2018		2019	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
≤SD	14.985	19,08	11.803	15,79	11.885	14,31
SMTP	7.116	9,06	5.452	7,29	7.050	8,49
≥ SMTA	56.447	71,86	57.493	76,92	64.095	77,19
JUMLAH	78.548	100,00	74.748	100,00	83.030	100,00

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2019, diolah Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

Apabila kita lihat perkembangannya selama tahun 2017 sampai dengan 2019 maka jumlah penganggur dengan pendidikan diatas SMTA bertambah paling banyak yaitu 4.482 orang, sementara penganggur berpendidikan SMTP berkurang 66 orang dan SD Kebawah berkurang 3.100 orang.

4.4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 cenderung meningkat, dari 3,27 % pada tahun 2017, naik menjadi 3,01 % tahun 2018 dan naik cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 3,35 %.

Apabila kita lihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota pada tahun 2019 menunjukkan bahwa TPT tertinggi terdapat di Kota Kupang yaitu 9,78 %, disusul Kabupaten Belu 7,19 %, Kabupaten Kupang 4,48 %, Kabupaten Lembata 4,31 % dan terkecil di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 0,95 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa terdapat kecenderungan di daerah perkotaan justru semakin besar probabilitasnya untuk menganggur. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena tingkat pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi sehingga didalam menerima pekerjaan cenderung pilih-pilih dan juga mereka dengan pendidikan tinggi tersebut juga menggambarkan kekuatan ekonomi keluarga yang lebih tinggi sehingga cukup tahan untuk lebih lama menganggur.

TABEL 4.4.2
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2017-2019

NO	Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
		2017	2018	2019
1	Sumba Barat	3.83	4.06	3,15
2	Sumba Timur	2.90	1.42	2,13
3	Kupang	3.52	2.71	4,48
4	Timor Tengah Selatan	1.70	1.01	1,94
5	Timor Tengah Utara	0.60	0.85	1,22
6	Belu	2.47	5.26	7,19
7	Alor	1.86	4.09	3,03
8	Lembata	4.18	5.40	4,31
9	Flores Timur	5.45	4.01	3,09
10	Sikka	2.50	2.43	3,56
11	Ende	3.66	2.89	2,98
12	Ngada	3.23	2.11	3,38
13	Manggarai	4.09	3.21	3,11
14	Rote Ndao	2.52	2.11	2,73
15	Manggarai Barat	1.30	1.19	2,42
16	Sumba Tengah	4.26	3.57	3,43
17	Sumba Barat Daya	1.61	1.01	1,25
18	Nagekeo	3.60	1.88	2,76
19	Manggarai Timur	0.50	1.57	0,95
20	Sabu Raijua	2.75	2.12	2,89
21	Malaka	1.07	3.79	2,34
22	Kota Kupang	12.50	10.17	9,78
Nusa Tenggara Timur		3.27	3.01	3,35

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2017-2019, diolah Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

BAB V

PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI, UKM, KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Secara umum kegiatan pembangunan koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian meliputi peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, Pembinaan, Pengembangan dan pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, serta pembangunan kawasan transmigrasi, pembinaan dan penempatan transmigrasi.

5.1. Koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pada tahun 2018 jumlah koperasi yang terbanyak berada di Kota Kupang, yaitu sebanyak 597 unit dengan anggota berjumlah 78.112 orang dan asset sebesar Rp. 749.377.065.105,-. Koperasi yang aktif berjumlah 539 unit, yang tidak aktif sebanyak 58 unit, koperasi yang ada badan hukumnya sebanyak 586 unit dan yang belum ada badan hukumnya sebanyak 11 unit. Sedangkan jumlah koperasi yang paling sedikit berada di Kabupaten Sabu Raijua berjumlah 49 unit dengan anggota berjumlah 2.623 orang dan asset sebesar Rp. 8.888.706.980,-. Koperasi yang aktif berjumlah 47 unit, tidak aktif 2 unit, koperasi yang berbadan hukum berjumlah 31 unit dan yang belum berbadan hukum berjumlah 18 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.1 berikut:

TABEL 5.1.1
REKAPITULASI DATA KERAGAAN KOPERASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	KABUPATEN/ KOTA	Koperasi (Unit)			Anggota (orang)			RAT (Unit)	Modal Sendiri (Rp)	Modal Luar (Rp)	Asset (Rp)	Volume Usaha (Rp)	SHU (Rp)	KETERANGAN			
		Aktif	Tdk Aktif	JLH	L	P	JLH							KOP.YG ADA BADAN HUKUM	BELUM ADA BADAN HUKUM		JLH KOP
															Ada Akta Anggar an Dasar	Blm Ada Akta AD	
1	Kota Kupang	539	58	597	44.389	33.723	78.112	211	224.631.153.213	524.745.911.892	749.377.065.105	419.916.404.695	19.617.266.419	586	4	7	597
2	Kupang	327	49	376	15.869	9.412	25.281	128	60.800.292.541	129.808.466.172	190.608.758.713	33.221.353.287	1.840.374.188	340	13	23	376
3	T T S	150	14	164	35.227	16.735	51.962	59	39.648.265.691	82.854.326.049	122.502.591.740	39.017.305.753	3.501.560.703	129	24	11	164
4	T T U	101	14	115	5.550	2.769	8.319	41	11.491.492.634	21.264.934.167	32.756.426.801	5.939.032.967	573.837.281	87	1	27	115
5	Belu	151	22	173	13.496	5.641	19.137	59	8.071.529.701	25.369.331.007	33.440.860.708	18.698.563.449	2.631.444.813	148	9	16	173
6	Malaka	124	11	135	8.866	6.522	15.388	48	9.902.559.000	4.775.001.500	14.677.560.500	10.559.493.410	1.071.787.407	68	7	60	135
7	Alor	165	28	193	15.264	13.262	28.526	64	19.956.018.703	33.621.553.184	53.577.571.887	29.017.921.383	3.820.516.416	142	27	24	193
8	Lembata	107	8	115	25.368	18.287	43.655	63	67.088.926.940	99.013.394.388	166.102.321.328	162.877.833.776	6.622.352.169	102	-	13	115
9	Flores Timur	194	10	204	72.447	48.819	121.266	75	246.702.424.721	955.836.504.021	1.202.538.928.742	485.777.741.665	9.025.186.797	193	11	-	204
10	Sikka	167	7	174	55.464	37.385	92.849	91	79.110.913.530	467.686.149.533	546.797.063.063	178.279.925.970	14.526.200.559	152	22	-	174
11	Ende	150	10	160	27.756	12.368	40.124	58	73.268.884.195	48.896.762.814	122.165.647.009	88.832.899.278	4.103.861.304	115	45	-	160
12	Ngada	116	6	122	19.602	16.376	35.978	55	228.744.458.904	88.370.586.024	317.115.044.928	132.152.467.317	35.977.342.411	107	14	1	122
13	Nagekeo	92	7	99	12.448	11.861	24.309	49	78.926.807.533	20.941.781.397	99.868.588.930	50.816.582.753	877.140.384	68	29	2	99
14	Manggarai	164	4	168	16.293	22.697	38.990	64	39.870.379.325	37.753.292.571	77.623.671.896	55.563.793.898	4.222.344.718	128	34	6	168
15	Manggarai Timur	113	4	117	9.745	9.099	18.844	51	41.362.968.901	23.323.359.560	64.686.328.461	13.020.843.411	1.935.643.030	51	66	-	117
16	Manggarai Barat	135	7	142	10.723	6.143	16.866	53	33.059.598.492	26.722.699.177	59.782.297.669	64.771.159.807	3.374.261.819	129	7	6	142
17	Sumba Timur	152	2	154	13.271	6.794	20.065	59	33.926.625.146	23.639.597.011	57.566.222.157	54.789.649.058	5.124.333.244	119	9	26	154
18	Sumba Tengah	51	1	52	924	738	1.662	25	1.759.823.579	5.854.129.220	7.613.952.799	8.859.130.957	3.375.243.395	40	9	3	52
19	Sumba Barat	114	11	125	16.696	9.001	25.697	44	18.976.677.414	26.573.334.389	45.550.011.803	28.997.192.639	5.291.966.829	91	17	17	125
20	Sumba Barat Daya	144	6	150	8.278	4.752	13.030	56	7.174.508.805	18.541.293.500	25.715.802.305	7.675.346.149	703.450.149	80	51	19	150
21	Rote Ndao	179	19	198	7.029	3.133	10.162	69	25.823.832.922	6.847.200.105	32.671.033.027	26.741.018.944	2.779.634.607	176	7	15	198
22	Sabu Raijua	47	2	49	1.701	922	2.623	18	2.025.654.500	6.863.052.480	8.888.706.980	10.212.653.865	1.767.581.132	31	1	17	49
23	Provinsi	294	61	355	269.445	204.100	473.545	135	1.297.796.160.263	1.688.936.242.351	2.986.732.402.614	3.240.076.299.680	231.207.345.017	344	11	-	355
JUMLAH		3.776	361	4.137	705.851	500.539	1.206.390	1.575	2.650.119.956.653	4.368.238.902.512	7.018.358.859.165	5.165.814.614.111	363.970.674.791	3.426	418	293	4.137

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Diskopnakertrans Provinsi NTT

Tahun 2019 jumlah koperasi terbanyak berada di Kota Kupang, yaitu sebanyak 607 unit, disusul Kabupaten Kupang sebanyak 376 unit, Kabupaten Flores Timur sebanyak 205 unit, Rote Ndao sebanyak 198 unit dan yang jumlahnya terkecil ada di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 49 unit.

Dari 607 unit koperasi yang ada di Kota Kupang, yang melaksanakan RAT hanya 195 unit atau 32,13 %. Asset yang dimiliki sebesar Rp. 852.542.584.344,- yang terdiri dari modal

sendiri sebesar Rp. 288.113.776.961,- dan modal luar sebesar Rp. 564.428.807.383,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.2.

TABEL 5.1.2
REKAPITULASI DATA KERAGAAN KOPERASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	Koperasi (Unit)			Anggota (orang)			RAT (Unit)	Modal Sendiri (Rp)	Modal Luar (Rp)	Asset (Rp)	Volume Usaha (Rp)	SHU (Rp)	KETERANGAN			
		Aktif	Tdk Aktif	JLH	L	P	JLH							KOP.YG ADA BADAN HUKUM	BELUM ADA BADAN HUKUM		JLH KOP
															Ada Akta Anggar an Dasar	Bim Ada Akta AD	
1	Kota Kupang	549	58	607	54.994	39.824	94.818	195	288.113.776.961	564.428.807.383	852.542.584.344	478.084.930.517	23.847.899.294	597	8	2	607
2	Kupang	327	49	376	16.326	9.767	26.093	101	63.656.882.496	69.008.173.634	132.665.056.130	33.048.446.472	1.840.374.188	340	13	23	376
3	T T S	145	14	159	25.134	11.964	37.098	52	26.880.171.556	27.083.536.050	53.963.707.606	23.580.101.317	2.250.875.004	129	24	6	159
4	T T U	67	33	100	5.328	2.597	7.925	38	11.367.619.837	21.264.934.167	32.632.554.004	5.939.032.967	573.837.281	87	1	12	100
5	Belu	119	53	172	13.491	5.628	19.119	39	8.068.529.701	24.869.331.007	32.937.860.708	18.835.363.449	2.635.644.813	149	9	14	172
6	Malaka	122	11	133	8.947	6.613	15.560	42	9.952.559.000	5.025.001.500	14.977.560.500	10.873.353.410	1.679.734.807	69	7	57	133
7	Alor	165	28	193	12.184	8.464	20.648	64	18.426.758.720	23.736.427.810	42.163.186.530	26.204.755.639	2.873.926.993	142	27	24	193
8	Lembata	107	8	115	25.350	18.253	43.603	63	83.382.926.940	99.613.394.388	182.996.321.328	177.820.525.986	6.996.152.169	102	-	13	115
9	Flores Timur	169	36	205	44.803	28.599	73.402	75	163.627.104.789	640.129.850.661	803.756.955.450	1.242.648.436.391	8.640.704.918	194	11	-	205
10	Sikka	148	35	183	62.055	41.632	103.687	91	95.154.763.760	432.660.061.019	527.814.824.779	350.035.289.860	15.475.940.127	161	22	-	183
11	Ende	150	10	160	30.261	14.209	44.470	58	77.481.174.204	53.846.762.814	131.327.937.018	113.762.899.278	5.312.966.304	115	45	-	160
12	Ngada	115	6	121	21.682	25.383	47.065	55	230.034.458.904	88.420.586.024	318.455.044.928	271.442.467.317	36.195.342.411	108	13	-	121
13	Nagekeo	86	13	99	29.364	51.600	80.964	49	234.867.075.992	106.866.444.531	341.733.520.523	247.529.281.464	1.501.156.953	68	29	2	99
14	Manggarai	162	4	166	17.368	22.631	39.999	64	39.169.087.475	38.759.573.174	77.928.660.649	81.577.188.185	3.810.990.605	126	34	6	166
15	Manggarai Timur	112	4	116	10.214	9.466	19.680	51	39.066.667.363	22.651.110.677	61.717.778.040	38.992.072.274	2.435.760.749	50	66	-	116
16	Manggarai Barat	135	7	142	11.365	6.974	18.339	53	34.405.098.492	26.722.699.177	61.127.797.669	71.173.756.113	3.374.261.819	129	7	6	142
17	Sumba Timur	123	31	154	15.798	8.376	24.174	29	35.716.478.471	23.640.979.318	59.357.457.789	72.275.119.982	5.142.402.573	120	9	25	154
18	Sumba Tengah	50	1	51	1.086	1.005	2.091	25	4.264.823.579	5.854.129.220	10.118.952.799	14.559.130.957	3.375.243.395	40	9	2	51
19	Sumba Barat	114	11	125	17.420	8.986	26.406	44	21.835.404.414	25.881.150.389	47.716.554.803	36.997.192.639	5.291.966.829	91	17	17	125
20	Sumba Barat Daya	144	6	150	9.759	13.333	23.092	56	7.709.030.455	19.684.593.500	27.393.623.955	13.963.705.033	688.738.404	80	51	19	150
21	Rote Ndao	179	19	198	8.585	4.800	13.385	69	35.326.327.562	19.303.895.196	54.630.222.758	60.634.457.388	3.807.362.698	176	7	15	198
22	Sabu Raijua	46	3	49	1.705	976	2.681	18	2.895.919.810	6.673.052.480	9.568.972.290	10.558.771.795	1.738.778.132	31	1	17	49
23	Provinsi	301	71	372	536.810	420.242	957.052	117	1.491.407.586.488	2.693.519.999.202	4.184.927.585.690	4.516.576.654.622	203.913.562.764	360	12	-	372
JUMLAH		3.635	511	4.146	980.029	761.322	1.741.351	1.448	3.022.810.226.969	5.039.644.493.321	8.062.454.720.290	7.917.112.933.055	343.403.623.230	3.464	422	260	4.146
Sumber: Bidang Kelembagaan dan Peneawasan Koperasi Diskopnakertrans Provinsi NTT																	

TaHUN 2020 jumlah koperasi yang ada di Provinsi NTT sebanyak 4.185 unit, dengan jumlah koperasi terbanyak berada di Kota Kupang, yaitu berjumlah 607 unit, disusul Kabupaten Kupang 394 unit, Kabupaten Flores Timur 25 unit, Kabupaten Rote Ndao 198 unit, dan yang jumlahnya paling sedikit ada di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 49 unit.

Jumlah asset keseluruhan sebesar Rp. 8.785.919.313.761,- yang terdiri dari modal sendiri sebesar Rp. 3.272.538.227.024,- dan modal luar sebesar Rp. 5.513.381.086.737,-. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.3.

TABEL 5.1.3
REKAPITULASI DATA KERAGAAN KOPERASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	Koperasi (Unit)			Anggota (orang)			RAT (Unit)	Modal Sendiri (Rp)	Modal Luar (Rp)	Asset (Rp)	Volume Usaha (Rp)	SHU (Rp)	KETERANGAN							
		Aktif	Tdk Aktif	JLH	L	P	JLH							KOP.YG ADA BADAN HUKUM	BELUM ADA BADAN HUKUM		JLH KOP				
															Ada Akta Anggar an Dasar	Blm Ada Akta AD					
1	Kota Kupang	563	54	617	56.709	40.600	97.309	126	379.287.013.170	587.929.243.988	967.216.257.158	539.433.483.924	2.672.355.641	610	7	-	617				
2	Kupang	364	30	394	16.914	10.029	26.943	120	65.231.451.238	71.989.662.498	137.221.113.736	87.321.244.321	2.619.637.329	381	13	-	394				
3	T T S	152	14	166	28.962	16.715	45.677	25	62.936.135.631	46.420.432.113	109.356.567.744	75.100.089.483	3.722.634.911	142	24	-	166				
4	T T U	92	12	104	5.939	2.987	8.926	37	17.432.231.754	17.980.851.986	35.413.083.740	18.165.671.521	1.618.211.322	91	1	12	104				
5	Belu	141	36	177	14.964	6.054	21.018	40	9.954.231.214	24.872.981.186	34.827.212.400	20.839.826.883	2.752.954.306	155	9	13	177				
6	Malaka	74	11	85	8.172	6.060	14.232	24	8.608.710.100	5.025.001.500	13.633.711.600	5.025.001.500	1.679.734.807	78	7	-	85				
7	Alor	164	23	187	12.067	8.406	20.473	74	18.070.308.720	23.736.427.810	41.806.736.530	25.759.193.139	2.873.926.993	144	27	16	187				
8	Lembata	107	8	115	25.319	18.200	43.519	43	83.302.326.940	99.613.394.388	182.915.721.328	177.820.525.986	6.996.152.169	114	-	1	115				
9	Flores Timur	175	30	205	45.212	28.934	74.146	60	166.989.754.543	640.352.632.243	807.342.386.786	1.242.648.436.391	8.640.704.918	194	11	-	205				
10	Sikka	153	34	187	62.869	44.361	107.230	65	110.326.330.448	475.244.560.840	585.570.891.288	375.422.308.956	876.811.621	165	22	-	187				
11	Ende	154	9	163	41.349	22.811	64.160	50	91.698.496.289	116.192.306.232	207.890.802.521	147.462.680.352	6.231.091.617	118	45	-	163				
12	Ngada	114	7	121	21.682	25.383	47.065	87	230.034.458.904	88.420.586.024	318.455.044.928	271.442.467.317	36.195.342.411	108	13	-	121				
13	Nagekeo	101	11	112	37.351	58.557	95.908	49	275.060.131.273	189.180.817.078	464.240.948.351	360.705.821.470	1.728.171.003	85	27	-	112				
14	Manggarai	167	4	171	16.909	21.865	38.774	41	37.135.427.885	35.117.332.369	72.252.760.254	79.811.981.978	3.724.503.057	137	34	-	171				
15	Manggarai Timur	114	4	118	10.255	9.476	19.731	37	39.127.267.363	22.651.110.667	61.778.378.030	38.992.072.274	2.435.760.749	52	66	-	118				
16	Manggarai Barat	140	7	147	11.365	6.974	18.339	28	35.369.548.352	23.916.957.617	59.286.505.969	71.173.756.113	3.374.261.819	133	7	7	147				
17	Sumba Timur	122	27	149	15.845	8.996	24.841	39	38.887.814.258	24.065.109.543	62.952.923.801	74.843.505.004	5.563.427.664	13	9	9	149				
18	Sumba Tengah	50	1	51	1.086	1.005	2.091	19	4.264.823.579	5.854.129.220	10.118.952.799	14.559.130.957	3.375.243.395	1	9	2	51				
19	Sumba Barat	114	11	125	17.909	9.547	27.456	22	26.454.962.359	26.963.968.963	53.418.931.322	40.296.197.026	6.323.661.801	91	17	17	125				
20	Sumba Barat Daya	145	6	151	4.166	1.882	6.048	25	3.015.408.920	9.519.493.500	12.534.902.420	10.446.315.615	435.103.783	97	54	-	151				
21	Rote Ndao	179	19	198	8.590	4.795	13.385	19	35.292.692.062	19.303.895.196	54.596.587.258	60.535.195.873	3.805.629.162	177	7	14	198				
22	Sabu Raijua	46	3	49	1.037	637	1.674	10	1.779.570.810	1.774.633.700	3.554.204.510	4.093.058.192	560.364.629	43	1	5	49				
23	Provinsi	341	52	393	624.102	467.899	1.092.001	77	1.532.279.131.212	2.957.255.558.076	4.489.534.689.288	4.286.511.734.964	11.789.910.994	383	10	-	393				
JUMLAH		3.772	413	4.185	1.088.773	822.173	1.910.946	1.117	3.272.538.227.024	5.513.381.086.737	8.785.919.313.761	8.028.409.699.239	119.995.596.101	3.512	420	96	4.185				
Sumber: Bidang Kelembagaan dan Peneewasan Koperasi Diskonnakertrans Provinsi NTT																					

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Diskopnakertrans Provinsi NTT

Perkembangan jumlah Koperasi di Provinsi NTT selama periode Tahun 2018 – 2020 mengalami pertumbuhan positif. Dari jumlah koperasi tahun 2018 sebanyak 4.137 unit menjadi 4.146 unit pada tahun 2019 dan bertambah lagi menjadi 4.185 unit tahun 2020.

Sedangkan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif mengalami fluktuasi selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Tahun 2018 koperasi yang aktif sebanyak 3.776 unit, turun menjadi 3.635 unit pada Tahun 2019 dan naik menjadi 3.772 unit pada 2020. Sedangkan koperasi yang tidak aktif pada tahun 2018 berjumlah 361 unit, naik menjadi 511 unit tahun 2019 dan tahun 2020 turun

menjadi 413 unit. Sedangkan dari jumlah anggota terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir. Demikian juga dengan penyerapan tenaga kerja terus meningkat dari 10.935 orang pada tahun 2018, bertambah menjadi 13.017 orang pada tahun 2020 atau naik sebesar 19,04 %.

Dari sisi permodalan, asset dan volume usaha juga terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan SHU mengalami penurunan jumlahnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.4.

TABEL 5.1.4						
Perkembangan Koperasi di Provinsi NTT Tahun 2018 - 2020						
No	Uraian	Satuan	TAHUN			Ket.
			2018	2019	2020	
1	Koperasi	Unit	4.137	4.146	4.185	
	- Aktif	Unit	3.776	3.635	3.772	
	- Tidak Aktif	Unit	361	511	413	
2	Anggota	Org	1.206.390	1.741.351	1.910.946	
3	Tenaga Kerja	Org	10.935	11.713	13.017	
	- Manajer	Org	1.669	1.577	1.795	
	- Karyawan	Org	9.266	10.136	11.222	
5	RAT	Unit	1.575	1.448	1.117	
6	Modal sendiri	Rp.	2.650.119.956.653	3.022.810.226.969	3.272.538.227.024	
7	Modal luar	Rp.	4.368.238.902.512	5.039.644.493.321	5.513.381.086.737	
8	Asset	Rp.	7.018.358.859.165	8.062.454.720.290	8.785.919.313.761	
9	Volume Usaha	Rp.	5.165.814.614.111	7.917.112.933.055	8.028.409.699.239	
10	SHU	Rp.	363.970.674.791	343.403.623.230	119.995.596.101	
Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Diskopnakertrans Provinsi NTT						

5.2. UKM (Usaha Kecil Menengah)

UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan UKM merupakan bagian yang integral dalam pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 5.2.1					
Data Sebaran UKM di Provinsi NTT Tahun 2018 - 2020					
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Mikro				
	- Unit	Unit	76.668	76.668	77.120
	- Asset	Rp.	444.515.400	444.515.400	544.515.400
	- Omzet	Rp.	2.998.410.200	2.998.410.200	3.283.410.200
2	Kecil				
	- Unit	Unit	24.954	24.954	24.965
	- Asset	Rp.	1.620.800.000	1.620.800.000	2.224.800.000
	- Omzet	Rp.	14.213.755.000	14.213.755.000	17.083.755.000
3	Menengah				
	- Unit	Unit	2.103	2.103	2.103
	- Asset	Rp.	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000
	- Omzet	Rp.	29.753.300.000	29.753.300.000	29.753.300.000
4	Jumlah				
	- Unit	Unit	103.725	103.725	104.188
	- Asset	Rp.	9.636.115.400	9.636.115.400	10.340.115.400
	- Omzet	Rp.	46.965.465.200	46.965.465.200	50.120.465.200
5	Tenaga Kerja				
	- Mikro	Orang	76.668	76.668	76.670
	- Kecil	Orang	24.936	24.936	24.947
	- Menengah	Orang	2.103	2.103	2.103
	- Jumlah	Orang	103.707	103.707	103.720
Sumber: Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Diskopnakertrans Provinsi NTT.					

Pada Tabel 5.2.1 terlihat sebaran UKM di Provinsi NTT Tahun 2018-2020 berjumlah 56.971 unit, yang terdiri dari skala usaha mikro berjumlah 40.198 unit, skala kecil berjumlah 16.036 unit dan skala menengah 737 unit. Sesuai dengan jumlah UKM berdasarkan skala usaha, maka penyerapan tenaga kerja yang terbanyak berasal dari UKM berskala mikro sebesar 92.380 orang atau 64,81 %, UKM berskala kecil sebanyak 48.049 orang atau 33,71 % dan yang terendah berasal dari UKM berskala menengah sebanyak 2.121 orang atau 1,49 %.

Pada tahun 2020 menunjukkan perubahan jumlah UKM dibandingkan tahun 2018 dan 2019, UKM berskala mikro menjadi 77.120 unit dan UKM berskala kecil menjadi 24.965 unit, sedangkan UKM berskala menengah menunjukkan angka yang sama, yaitu 2.103 unit.

5.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh UPTD Latihan Kerja dan Bidang Ketenagakerjaan.

5.3.1. Pelatihan di UPTD Latihan Kerja

Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Latihan Kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir telah berhasil melatih sebanyak 2.838 orang, yaitu melalui pelatihan Institusional sebanyak 2.038 orang dan Non Institusional sebanyak 800 orang.

Jumlah pelatihan ketrampilan Institusional per tahun memang bervariasi dan mengalami pasang surut seiring dengan kurangnya anggaran baik APBN maupun APBD yang diterima UPTD Latihan Kerja Kupang.

Tabel 5.3.1.1					
Pelatihan Institusional di UPTD Latihan Kerja					
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020					
No.	Kejuruan/Tahun	2018	2019	2020	Jumlah
1	Otomotif Sepeda Motor	-	32	96	128
2	Otomotif Mobil	32	16	32	80
3	Meubelair	-	32	80	112
4	Perhotelan	-	-	48	48
5	Las Listrik	-	32	80	112
6	Menjahit	64	32	320	416
7	Teknisi Audio Video	-	-	16	16
8	Perawatan AC Split	-	-	16	16
9	Prosesing	-	-	48	48
10	Autocad	-	-	32	32
11	Kecantikan	-	-	48	48
12	Handy Craft	-	-	48	48
13	Desain Grafis	-	-	32	32
14	Tatalaksana RT	32	-	128	160
15	Operator Basic Office	-	16	48	64
16	Inst. Penerangan	-	16	16	32
17	Menjahit Garmen	192	-	-	192
18	Pembudidayaan Sayuran Hidroponik	-	-	64	64
19	Hasil Pertanian	-	16	-	16
20	Kecantikan kulit dan Rambut	-	32	64	96
21	Teknis Telpn seluler	-	16	32	48
22	Garmen	-	48	-	48
23	CPMI Sektor Kelapa Sawit	-	-	102	102
24	Gardener	-	-	16	16
25	Pangkas Rambut	-	-	16	16
26	Baby Sitter	-	-	16	16
27	Finishing Teknik Semprot	-	-	16	16
28	Painting	-	-	16	16
Jumlah		320	288	1.430	2.038

Sumber : UPTD Latihan Kerja Diskopnakertrans Provinsi NTT

Jumlah peserta pelatihan Institusional terbanyak adalah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.430 orang dan terkecil pada tahun 2019 yaitu sebanyak 288 orang.

Sedangkan apabila dilihat menurut kejuruan, maka pelatihan terbesar pada kejuruan menjahit sebanyak 416 orang dan terkecil pada kejuruan Teknisi Audio Video, perawatan AC split, hasil pertanian, gardener, pangkas rambut, baby sitter, finishing teknik semprot dan painting, masing masing sebanyak 16 orang. Besarnya jumlah peserta pelatihan kejuruan menjahit ini disebabkan karena ada rencana pihak swasta dari Jawa Tengah akan membuka perusahaan Garmen di Kota Kupang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.3.1.2.

Tabel 5.3.1.2					
Pelatihan Non Institusional di UPTD Latihan Kerja					
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020					
No.	Kejuruan/Tahun	2018	2019	2020	Jumlah
1	Sepeda Motor	32	32	-	64
2	Meubelair	32	32	-	64
3	Las Listrik		16	-	16
4	Menjahit	32	16	48	96
5	Processing Hasil Pertanian	-	-	16	16
6	handy Craft	-	-	32	32
7	Kecantikan Kulit & Rambut	-	-	16	16
8	Otomotif Mobil	-	16	-	16
9	Pelatihan peningkatan produktivitas	-	-	100	100
10	Pelatihan wirausaha baru produktif	-	-	200	200
11	Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru	-	-	180	180
Jumlah		96	112	592	800

Sumber : UPTD Latihan Kerja Diskopnakertrans Provinsi NTT

Jumlah Pelatihan Ketrampilan Non Institusional atau sering juga disebut sebagai Mobil Training Unit (MTU) di UPTD Latihan Kerja Kupang, selama 3 (tiga) tahun terakhir, telah melatih sebanyak 800 orang dengan jumlah peserta terbanyak pada tahun 2020 sebanyak 592 orang dan terkecil pada tahun 2018 sebanyak 96 orang. Dilihat

menurut kejuruan maka pelatihan ketrampilan yang banyak diikuti peserta adalah Menjahit, meubelair dan sepeda motor.

5.3.2. Pelatihan oleh Dinas Nakertrans Provinsi NTT

Pada Dinas Kopnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat Bidang Ketenagakerjaan yang juga bertanggung jawab dibidang pelatihan ketenagakerjaan. Fungsi dari bidang ini dibidang pelatihan ketrampilan tenaga kerja adalah membina dan membina dan memberdayakan Lembaga Latihan Kerja.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Bidang Ketenagakerjaan telah melakukan Pelatihan Ketrampilan tenaga kerja sebanyak 520 orang, Pengembangan Ekonomi dan Produktivitas sebanyak 465 orang, Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 660 orang dan Bimbingan Teknis sebanyak 1.025 orang atau dengan total keseluruhan melatih 2.670 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.3.2.1. dibawah

Tabel 5.3.2.1					
Pelatihan Pada Bidang Ketenagakerjaan					
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur					
Tahun 2018 - 2020					
No.	Kejuruan/Tahun	2018	2019	2020	Jumlah
A.	Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja				
1	Prosesing	-	40	-	40
2	Persiapan ASC (Kompetensi Ketrampilan)	50	-	-	50
3	Pemagangan	150	130	150	430
	Jumlah A	200	170	150	520
B.	Pengembangan Usaha Ekonomi dan Produktivitas				
1	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	-	-	375	375
2	Pembentukan Desa Produktif	20	20	50	90
	Jumlah B	20	20	425	465
C.	Pelatihan Kewirausahaan				
1	Kewirausahaan	-	20	550	570
2	TTG	20	20	50	90
	Jumlah C	20	40	600	660
D.	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Desiminasi				
1	Bimtek Pengelola LPKS	25	15	20	60
2	Bimtek Instruktur LPKS	20	-	20	40
3	Optimalisasi Komite Akreditasi LPK	-	20	20	40
4	Fasilitasi Pencegahan TKI non prosedural/Satgas Pencegahan TKI Illegal	-	335	-	335
5	Pelatihan Ketrampilan Bernegosiasi dalam Hubungan Industrial	-	-	50	50
6	Desiminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi Sektor Informal	-	-	100	100
7	Desiminasi Pencegahan TKI Non Posedural	50	-	-	50
8	Sosialisasi Mekanisme Penempatan TK	250	100	-	350
	Jumlah D	345	470	210	1.025
	TOTAL	585	700	1.385	2.670
Sumber: Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Prov. NTT					

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, dalam rangka memberdayakan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta melalui mekanisme pelatihan dengan pihak ketiga, telah dilakukan pelatihan sebanyak 392 orang dengan rincian sesuai tabel 5.3.2.2. sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.2					
Pelatihan Kerjasama dengan Pihak Ketiga					
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur					
Tahun 2018 - 2020					
No.	Kejuruan/Tahun	2018	2019	2020	Jumlah
1	Menjahit	40	16	40	96
2	Meubelair	-	32	20	52
3	Otomotif motor	-	32	20	52
4	Tata Rias Kecantikan	20	-	-	20
5	Teknisi Komputer	20	-	20	40
6	Tata Boga	20	-	-	20
7	Tenun Ikat	20	-	-	20
8	Las	-	16	-	16
9	Otomotif Mobil	-	16	-	16
10	TTG (Pelatihan Pendayagunaan Semen)	-	20	-	20
11	Pelatihan Prosesing	-	20	-	20
12	Pelatihan Daur Ulang	-	20	-	20
Jumlah		120	172	100	392
Sumber: Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Prov. NTT					

5.3.3. Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja Oleh Dinas Kabupaten/Kota

Selain pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan UPTD Latihan Kerja, maka pelatihan juga dilakukan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan Ketramsmigrasian di Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan Ketramsmigrasin di Kabupaten/Kota telah melatih sebanyak 4.921 orang.

TABEL 5.3.3				
PELATIHAN KETRAMPILAN TENAGA KERJA				
YANG DILAKSANAKAN DINAS KETENAGAKERJAAN				
DI KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2020				
KABUPATEN/KOTA	TAHUN			JUMLAH
	2018	2019	2020	
1. Sumba Barat	61	16	10	87
2. Sumba Timur	148	196	110	454
3. Kupang	200	116	70	386
4. Timor Tengah Selatan	60	220	112	392
5. Timor Tengah Utara	100	100	-	200
6. Belu	80	-	-	80
7. Malaka	35	246	-	281
8. Alor	50	16	-	66
9. Lembata	8	-	-	8
10. Flores Timur	200	45	100	345
11. Sikka	51	51	116	218
12. Ende	144	80	-	224
13. Ngada	16	42	26	84
14. Manggarai	308	-	-	308
15. Rote Ndao	170	62	37	269
16. Manggarai Barat	167	212	133	512
17. Sumba Tengah	60	-	-	60
18. Sumba Barat Daya	310	112	78	500
19. Nagekeo	30	-	-	30
20. Manggarai Timur	30	46	45	121
21. Sabu Raijua	36	15	36	87
22. Kota Kupang	30	122	57	209
JUMLAH	2.294	1.681	920	4.921
<i>Sumber : Hasil Monitoring di Kabupaten/Kota se NTT</i>				

Kabupaten yang paling intens melakukan pelatihan ketrampilan tenaga kerja adalah Kabupaten Manggarai Barat yang berhasil melatih sebanyak 512 orang, disusul Kabupaten Sumba Barat Daya 500 orang, Kabupaten Sumba Timur 454 orang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan 392 orang. Sementara Kabupaten yang paling sedikit melatih adalah Kabupaten Lembata hanya melatih sebanyak 8 orang selama 3 tahun terakhir.

Adapun jumlah tenaga kerja yang berhasil dilatih oleh Kabupaten/ Kota seara rinci dapat dilihat pada tabel 5.3.3 diatas.

5.4. Penempatan dan Perluasan Kerja

5.4.1. Bursa Kesempatan Kerja

Bursa Kesempatan Kerja adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjembatani pencari kerja yang terdaftar dengan lowongan yang tersedia. Melalui bursa kesempatan kerja ini diharapkan proses pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi kerja dapat dipercepat melalui sistem informasi yang tepat, didalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri di Bursa Kesempatan Kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir periode 2018 s/d 2020 sebanyak 17.414 orang, dari jumlah tersebut berhasil ditempatkan sebanyak 1.251 orang dari jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 3.463 lowongan.

TABEL 5.4.1.1									
BURSA KESEMPATAN KERJA TAHUN 2018 - 2020									
TAHUN	PENCAKER TERDAFTAR			PENEMPATAN PENCAKER			LOWONGAN TERDAFTAR		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
2018	1.487	1.694	3.181	533	637	1.170	1.290	1.255	2.545
2019	2.129	4.654	6.783	1	35	36	135	310	445
2020	2.488	4.962	7.450	31	14	45	156	317	473
Sumber: Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Prov. NTT									

Sumber: Bidang ketenagakerjaan Diskopnakertrans Provinsi NTT.

Dengan demikian rasio antara jumlah penempatan pencari kerja dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar sebesar 14,37 % atau sebanyak 14,37 % pencari kerja yang terdaftar berhasil diantar untuk bekerja di perusahaan yang membutuhkan sementara sisanya sebesar 85,63 % tidak berhasil dibantu penempatannya. Secara teori, kondisi ini disebabkan karena lowongan yang tersedia sangat

terbatas, disamping itu tidak semua lowongan yang tersedia diminati oleh para pencari kerja yang ada.

Rasio antara jumlah penempatan pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia sebesar 36,12 %, dengan kata lain dari lowongan yang tersedia sebesar 36,12 % dapat diisi/dimanfaatkan oleh pencari kerja dan sisanya sebesar 63,88 % gagal diisi.

TABEL 5.4.1.2									
RASIO BURSA KESEMPATAN KERJA TAHUN 2018-2020									
TAHUN	% Penempatan Pencaker			% Pengisian Lowongan			Rasio Pencaker & Lowongan		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
2018	35,84	37,60	36,78	41,32	50,76	45,97	1,15	1,35	1,25
2019	0,05	0,75	0,53	0,74	11,29	8,09	15,77	15,01	15,24
2020	1,25	0,28	0,60	19,87	4,42	9,51	15,95	15,65	15,75
Sumber: Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Prov. NTT									

Apabila dilihat kondisi per tahun maka rasio penempatan tenaga kerja terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar cenderung bervariasi dan fluktuatif dimana kemampuan penempatan pencari kerja terbesar pada tahun 2018 yaitu 36,78 % dan terkecil pada tahun 2019 yaitu 0,53 %. Rasio ini menggambarkan kemampuan kita didalam menempatkan pencari kerja yang terdaftar di Bursa Kesempatan Kerja.

Kemampuan menempatkan pencari kerja ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lowongan kerja yang tersedia. Rasio pencari kerja terhadap lowongan kerja yang tersedia tertinggi ditahun 2020 yaitu sebesar 15,75 % dan terendah ditahun 2018 sebesar 1,25 %.

Dari tabel 5.4.1.2 diatas nampak bahwa rasio pengisian lowongan tertinggi ditahun 2018 yaitu 45,97 % dan terendah ditahun 2019 sebesar 8,09 %. Rasio ini menggambarkan kemampuan kita didalam mengisi/memanfaatkan lowongan yang tersedia.

5.4.2. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu periode tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar 3.535 orang dan dari tahun ketahun menunjukkan jumlah yang fluktuatif, yaitu dari 1.447 orang pada tahun 2018 naik menjadi 1.613 Orang pada tahun 2019 dan turun drastis menjadi 475 orang pada periode 2020.

Apabila dilihat dari daerah asal TKI, maka jumlah penempatan terbesar berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya yang selama 3 (tiga) tahun terakhir telah menempatkan TKI ke Luar negeri sebanyak 699 orang, disusul Kabupaten Kupang sebesar 680 orang dan terkecil adalah Kabupaten Sabu Raijua dengan penempatan sebanyak 2 orang.

Untuk melihat jumlah pengiriman TKI menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 5.4.2.1 sebagai berikut:

TABEL 5.4.2.1										
TENAGA KERJA INDONESIA YANG DITEMPATKAN MENURUT DAERAH ASAL										
TAHUN 2018 - 2020										
NO.	KABUPATEN	TAHUN								
		2018			2019			2020		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Sumba Barat	-	72	72	2	82	84		4	4
2	Sumba Timur	12	100	112	10	152	162		49	49
3	Kab. Kupang	12	264	276	34	278	312		92	92
4	TTS	37	82	119	39	123	162	11	43	54
5	TTU	-	18	18	-	20	20		9	9
6	Belu	27	80	107	46	130	176	3	39	42
7	Alor	-	1	1		2	2			-
8	Lembata	1	2	3	1		1			-
9	Flotim	2	6	8	-	6	6	1	1	2
10	Sikka	-	18	18	-	17	17	-	4	4
11	Ende	3	24	27	3	47	50	-	1	1
12	Ngada	-	4	4	-	11	11	-	1	1
13	Manggarai	-	2	2	-	3	3	-	-	-
14	Rote Ndao	30	65	95	34	51	85	-	32	32
15	Manggarai Barat	6	-	6	-	-	-	-	-	-
16	Sumba Barat Daya	-	286	286	5	271	276	-	137	137
17	Sumba Tengah	-	42	42	3	13	16	-	2	2
18	Nagekeo	1	9	10	3	33	36	-	1	1
19	Manggarai Timur	19	52	71	-	27	27	-	6	6
20	Sabu Raijua	-	1	1	-	1	1	-	-	-
21	Kota Kupang	4	64	68	2	61	63	-	9	9
22	Kab. Malaka	17	84	101	17	86	103	7	23	30
JUMLAH				-						
		171	1.276	1.447	199	1.414	1.613	22	453	475
Sumber : Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Prov. NTT										

Sedangkan apabila dilihat dari negara tujuan penempatan TKI maka penempatan terbesar adalah negara Malaysia dan terkecil adalah negara Sudan dan Uzbekistan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.4.2.2. dibawah ini:

TABEL 5.4.2.2										
TENAGA KERJA INDONESIA YANG DITEMPATKAN MENURUT NEGARA TUJUAN										
TAHUN 2018- 2020										
NO.	NEGARA TUJUAN	TAHUN								
		2018			2019			2020		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	MALAYSIA	164	1.073	1.237	193	1.124	1.317	21	415	436
2	SINGAPURA	-	94	94	1	122	123	-	29	29
3	HONGKONG	-	25	25	1	35	36	-	9	9
4	BRUNAI DARUSSALAM	-	76	76	-	117	117	-	-	-
5	QATAR	4	-	4	-	2	2	-	-	-
6	TAIWAN	-	1	1	-	1	1	-	-	-
7	OMAN	-	1	1	-	2	2	-	-	-
8	ABUDHABI/UNI	-	2	2	-	-	-	-	-	-
9	TIMOR LESTE	1	1	2	1	3	4	-	-	-
10	GABON	-	-	-	2	-	2	-	-	-
11	SUDAN	1	-	1	-	-	-	-	-	-
19	UZBEKISTAN	-	1	1	-	-	-	-	-	-
20	TURKI	-	1	1	-	8	8	-	-	-
21	SOLOMON	1	1	2	1	-	1	1	-	1
JUMLAH		171	1.276	1.447	199	1.414	1.613	22	453	475
Sumber : Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Prov. NTT										

5.4.3. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Penempatan tenaga kerja keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didalam rangka mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan lowongan kerja yang tersedia di Provinsi lain di Indonesia.

Penempatan Tenaga Kerja AKAD asal NTT pada tahun 2018 sebanyak 92 orang dengan daerah penempatan di Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

Dilihat dari jenis kelamin, pengiriman tenaga kerja AKAD kita pada tahun 2018 sebagian besar perempuan sebesar 60 orang yang bekerja disektor perkebunan dan pranata rumah tangga sedangkan sisanya sisanya laki-laki sebanyak 32 orang bekerja disektor perkebunan.

Dilihat dari daerah asal maka terbesar berasal dari Kabupaten Belu sebanyak 26 orang, disusul Malaka dan Rote Ndao masing-masing sebanyak 20 orang, Kab. Manggarai Timur sebanyak 12 orang, dan Ende sebanyak 4 Orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.4.3.1. sebagai berikut:

TABEL 5.4.3.1								
PENEMPATAN TENAGA KERJA AKAD ASAL PROVINSI NTT								
TAHUN 2018								
Provinsi Penempatan		Lokasi Kerja	Daerah Asal	Sektor	Nama Perusahaan	Penempatan TK AKAD		Jumlah
						Laki-laki	Perempuan	
1	Kalimantan	Nunukan	Kab. Belu	Kelapa Sawit	PT Karang Juang	20	5	25
	Timur		Kab. Malaka	Kelapa Sawit	Hijau Lestari	7	13	20
			Kab. Manggarai Timur	Kelapa Sawit		5	7	12
2	DKI Jakarta	Jakarta	Kab. Nagekeo	Penata Laksana	PT Timor Sakti Setia	-	10	10
			Kab. Rote Ndao	Asisten RT dan	PT Citra Kartini Mandiri	-	20	20
			Kab. Ende	Penata Laksana	PT Timor Sakti Setia	-	4	4
3	Kepulauan Riau	Batam	Kab. Belu	Penata Laksana	PT Hadi Jaya	-	1	1
JUMLAH						32	60	92
Sumber : Dinas Kopnakertrans Prov. NTT								

Sumber : Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

Sedangkan pada tahun 2019 penempatan tenaga kerja AKAD berjumlah 40 orang dengan daerah penempatan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

Pengiriman tenaga kerja AKAD tahun 2018 didominasi oleh perempuan yang bekerja disektor jasa sebagai penatalaksana rumah tangga sebanyak 40 orang.

Dilihat dari daerah asal, maka yang terbanyak berasal dari Kabupaten Belu sebanyak 15 orang, disusul dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan

Flores Timur masing-masing sebanyak 7 orang, Kabupaten Ende sebanyak 5 orang, dan Kabupaten TTS sebanyak 3 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.4.3.2 berikut:

TABEL 5.4.3.2								
PENEMPATAN TENAGA KERJA AKAD ASAL PROVINSI NTT								
TAHUN 2019								
	Provinsi Penempatan	Lokasi Kerja	Daerah Asal	Sektor	Nama Perusahaan	Penempatan TK AKAD		Jumlah
						Laki-laki	Perempuan	
1	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kab. Sumb Barat Daya	Jasa/PLRT	PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	5	5
2	Banten	Tangerang	Kab. Flores Timur	Jasa/PLRT	PT. Citra Kartini Mandiri	-	7	7
3	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kab. Kupang	Jasa/PLRT	PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	2	2
4	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kab. Kupang	Jasa/PLRT	PT. Hady Jaya	-	5	5
5	Banten	Kota Tangerang Selatan	Kab. Belu	Jasa/PLRT	PT. Citra Kartini Mandiri	-	12	12
6	Banten	Tangerang	Kab. Ende	Jasa/PLRT	PT. Citra Kartini Mandiri	-	7	7
7	Banten	Kota Tangerang Selatan	Kab. Belu	Jasa/PLRT	PT. Citra Kartini Mandiri	-	8	8
8			Maritim	Jasa/PLRT	PT. Citra Kartini Mandiri	-	8	8
9	Sumatera Utara	Medan	Kab. TTS	Jasa/PLRT	PT.Asisten Rumah Indonesia	-	3	3
10	Bekasi	Kota Bekasi	Kab. Sumba Timur	Jasa/PLRT	PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	2	2
11	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kab. Sumb Barat Daya	Jasa/PLRT	PT. Hady Jaya	-	7	7
12	Jawa Barat	Kota Bekasi	Kab. Manggarai Timur	Jasa/PLRT	PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	10	10
13	Jawa Barat	Kota Bekasi	Kab. Sumba Timur	Jasa/PLRT	PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	5	5
14								
15	Kalimantan Barat	Kab.Ketapang	Kab. Belu	Perkebunan/ Kelapa sawit	PT. Limpah Sejahtera	24	6	30
16	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kab. Belu	Jasa/PLRT	PT. Tugas Mulia	-	3	3
17	Jawa Barat	Kota Bekasi	Kab. Nagekeo	Jasa/PLRT	PT.Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	4	4
18	Jawa Barat	Kota Bekasi	Kab. Kupang	Jasa/PLRT	PT.Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	1	1
19	Jawa Barat	Kota Bekasi	Kab. Ngada	Jasa/PLRT	PT.Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	2	2
20	Jawa Barat	Kota Bekasi	Kab. TTS	Jasa/PLRT	PT.Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	2	2
21	Sumatera Utara	Medan	Kab. Malaka	Jasa/PLRT	PT.Asisten Rumah Indonesia	-	6	6
22	Sumatera Utara	Medan	Kab. TTS	Jasa/PLRT	PT.Asisten Rumah Indonesia	-	1	1
23	Sumatera Utara	Medan	Kab. TTS	Jasa/PLRT	PT. Rini Azhari Bayihaki	-	1	1
24	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kab. Kupang	Jasa/PLRT	PT. Hady Jaya	-	2	2
25	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kab. Nagekeo	Jasa/PLRT	PT.Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	2	2
26	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kab. Ngada	Jasa/PLRT	PT.Mutiara Timur Mitra Perkasa	-	3	3
JUMLAH						24	114	138

Sumber : Dinas Kopnakertrans Prov. NTT

Dari Tabel 5.4.3.3 dapat dilihat bahwa pengiriman tenaga kerja AKAD tahun 2020 didominasi oleh perempuan yang bekerja disektor jasa sebagai penatalaksana rumah tangga sebanyak 39 orang yang berasal dari Kabupaten Nagekeo, Manggarai, Rote Ndao dan Belu dengan tujuan penempatan di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara.

TABEL 5.4.3.3								
PENEMPATAN TENAGA KERJA AKAD ASAL PROVINSI NTT								
TAHUN 2020								
	Provinsi Penempatan	Lokasi Kerja	Daerah Asal	Sektor	Nama Perusahaan	Penempatan TK AKAD		Jumlah
						Laki-laki	Perempuan	
1	DKI Jakarta	Jakarta	Nagekeo	Jasa/PLRT	PT. Timor Sakti Setia	-	7	7
2	Banten	Tangerang	Manggarai	Jasa/PLRT	PT. Setia Prestasi Amandari	-	3	3
3	Banten	Tangerang	Rote Ndao	Jasa/PLRT	PT. Setia Prestasi Amandari	-	10	10
4	Banten	Tangerang	Belu	Jasa/PLRT	PT. Setia Prestasi Amandari	-	15	15
5	Sumatera Utara	Medan	Belu	Jasa/PLRT	PT. Asisten Rumah Indonesia	-	4	4
JUMLAH						-	39	39
Sumber : Dinas Kopnakertrans Prov. NTT								

5.5. Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tujuan pengembangan dan pembinaan Hubungan Industrial adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial.

Sasaran pengembangan dan pembinaan hubungan industrial adalah Terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, Harmonis, Berkeadilan dan Bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melauai perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rangka pembinaan syarat kerja dan perangkat hubungan industrial maka telah difasilitasi pembentukan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, LKS Bipartit dan LKS Tripartit. Selain itu juga senantiasa melakukan koordinasi dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perusahaan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis antara pengusaha dan karyawan, dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan usaha perusahaan.

Tujuan dan manfaat pembuatan peraturan perusahaan adalah adanya kepastian adanya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Jumlah pembuatan Peraturan Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup memadai yaitu dari 591 PP pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi 590 PP.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang tersusun selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak berubah, yaitu sebanyak 45 PKB pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Jumlah Serikat Pekerja relatif tetap pada jumlah 148 SP pada tahun 2018 menurun drastis pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 22.

LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang sudah

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Jumlah LKS Bipartit pada tahun 2018 berjumlah 116 LKS Bipartit dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 176 LKS Bipartit.

LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, dengan anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pemerintah. Tugas dari LKS Tripartit adalah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah. Jumlah LKS Tripartit pada tahun 2018 sebesar 17 LKS dan pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada.

TABEL 5.5.1.				
SYARAT-SYARAT KERJA DAN PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL				
DI PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2020				
NO	SARANA HI	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Peraturan Perusahaan (PP)	591	585	590
2	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	45	45	45
3	Serikat Pekerja (SP)	148	22	22
4	Serikat Buruh (SB)	19	22	22
5	LKS BIPARTIT	116	116	176
6	LKS TRIPARTIT	17	0	0
Sumber : Dinas Kopnakertrans Prov. NTT				

Salah satu aspek penting dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan pekerja adalah upah. Pada setiap tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan penyesuaian Upah Minimum Provinsi. Penetapan upah minimum adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada pekerja/buruh. Penetapan upah minimum adalah jaring pengaman agar upah pekerja tidak jatuh ke level terendah. Pada dasarnya upah minimum untuk melindungi upah yang diterima oleh

pekerja yang berpendidikan rendah, pekerja yang tidak memiliki ketrampilan/skill, pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.

Tujuan ditetapkan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja/buruh dari kesewenangan pengusaha yang memberikan upah tidak layak. Dengan begitu tujuan lain dapat dicapai yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak.

Upah Minimum Provinsi di Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan seiring peningkatan Kebutuhan Hidup Layak setiap tahunnya.

Jumlah UMP pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.800.000,- dan UMP meningkat menjadi Rp. 1.950.000,00 pada tahun 2019 sementara UMP Kota Kupang Rp. 2.050.000,00 pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi Rp. 1.950.000,-.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.5.2 berikut ini:

TABEL 5.5.2.				
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)				
DI PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2020				
NO.	KAB/KOTA	UMP		
		2018	2019	2020
1	Sumba Barat	1.660.000	1.800.000	1.950.000
2	Sumba Timur	1.660.000	1.800.000	1.950.000
3	Kab. Kupang	1.660.000	1.800.000	1.950.000
4	TTS	1.660.000	1.800.000	1.950.000
5	TTU	1.660.000	1.800.000	1.950.000
6	Belu	1.660.000	1.800.000	1.950.000
7	Alor	1.660.000	1.800.000	1.950.000
8	Lembata	1.660.000	1.800.000	1.950.000
9	Flotim	1.660.000	1.800.000	1.950.000
10	Sikka	1.660.000	1.800.000	1.950.000
11	Ende	1.660.000	1.800.000	1.950.000
12	Ngada	1.660.000	1.800.000	1.950.000
13	Manggarai	1.660.000	1.800.000	1.950.000
14	Rote Ndao	1.660.000	1.800.000	1.950.000
15	Manggarai Barat	1.660.000	1.800.000	1.950.000
16	Sumba Barat Daya	1.660.000	1.800.000	1.950.000
17	Sumba Tengah	1.660.000	1.800.000	1.950.000
18	Nagekeo	1.660.000	1.800.000	1.950.000
19	Manggarai Timur	1.660.000	1.800.000	1.950.000
20	Sabu Raijua	1.660.000	1.800.000	1.950.000
21	Kota Kupang	1.712.000	1.850.000	2.050.000
Sumber: Diskopnakertrans Prov. NTT				

Salah satu tugas Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT dalam rangka membina Hubungan Industrial yang harmonis dan dinamis adalah memediasi perselisihan hubungann industrial dan penanganan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja.

Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau perjanjian kerjasama.

Jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 158 kasus yang melibatkan 272 orang tenaga kerja dan selama periode yang sama telah berhasil diselesaikan sebanyak 150 kasus dengan melibatkan 242 orang tenaga kerja. Dengan demikian sampai dengan tahun 2019 sisa kasus yang belum terselesaikan adalah 20 kasus yang melibatkan 59 orang tenaga kerja.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.5.3 dibawah ini.

TABEL 5.5.3													
PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI PROVINSI NTT													
TAHUN 2018 - 2020													
NO.	TAHUN	SISA PERKARA TAHUN/BULAN LALU			JUMLAH PERKARA			PERKARA YANG SELESAI			SISA PERKARA		
		PHI	PHK		PHI	PHK		PHI	PHK		PHI	PHK	
			KASUS	TK		KASUS	TK		KASUS	TK		KASUS	TK
1	2018	-	12	29	-	41	104	-	36	72	-	17	61
2	2019	-	17	61	-	63	89	-	52	72	-	28	78
3	2020	-	28	78	-	54	79	-	62	98	-	20	59
Sumber: Diskopnakertrans Prov. NTT													

5.6. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Tujuan pengawasan ketenagakerjaan adalah menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair to treatment), profesional dan seragam di seluruh Nusa Tenggara Timur dengan sasaran adalah terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal.

Jumlah perusahaan berdasarkan UU nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu sebanyak 5.427 perusahaan dengan tenaga kerja 70.669 orang pada tahun 2018 meningkat menjadi 5.762 perusahaan dengan tenaga kerja 73.126 orang pada tahun 2019.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.6.1. dibawah ini.

TABEL 5.6.1.					
JUMLAH PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA					
DI PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2019					
NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA		
			WNI	WNA	JUMLAH
1	2018	5.427	70.669	115	70.784
2	2019	5.762	73.126	271	73.397

Sumber: Diskopnakertrans Prov. NTT

Jumlah Pegawai Pengawas aktif di Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sebanyak 26 orang.

Dengan demikian rasio antara jumlah Pegawai Pengawas Aktif dengan perusahaan yang ada adalah 1:222, artinya jika kemampuan ideal pegawai pengawas per orang mengawasi 80 perusahaan maka diperlukan sekitar 72 pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasinya. Dengan ketersediaan pegawai pengawas sekarang yang sekitar hanya 26 orang, maka masih dibutuhkan pegawai pengawas baru sebanyak 46 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.6.2. sebagai berikut:

TABEL 5.6.2.									
DATA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIRINCI MENURUT PEGAWAI PENGAWAS,									
JUMLAH PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2019									
KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENGAWAS		JUMLAH PERUSH			JUMLAH PERUSH	JUMLAH TK		TOTAL TK
	AKTIF	PINDAH	KECIL	SEDANG	BESAR		WNI	WNA	
KOTA KUPANG	-	-	1.133	127	33	1.293	15.474	23	15.497
KAB. KUPANG	-	-	120	34	13	167	3.510	70	3.580
KAB. TTS	-	-	250	39	5	294	3.378	-	3.378
KAB. TTU	-	-	184	23	3	210	3.578	4	3.582
KAB. LEMBATA	1	-	170	20	6	196	2.594	5	2.599
KAB. FLOTIM	1	-	278	36	6	320	5.375	10	5.385
KAB. BELU	2	-	349	43	7	399	4.250	8	4.258
KAB. ROTE NDAO	1	-	129	17	8	154	2.478	14	2.492
KAB. SUMBA TIMUR	1	-	317	38	9	364	2.996	4	3.000
KAB. SUMBA BARAT	1	-	253	22	3	278	5.695	19	5.714
KAB. MANGGARAI	-	-	203	46	4	253	4.080	15	4.095
KAB. MANGGARAI BARAT	-	-	77	45	15	137	2.601	50	2.651
KAB. NGADA	1	-	110	37	2	149	2.516	4	2.520
KAB. ENDE	-	-	527	37	6	570	5.502	5	5.507
KAB. SIKKA	1	-	433	40	5	478	3.589	26	3.615
KAB. ALOR	1	-	165	27	7	199	1.405	13	1.418
KAB. NAGEKEO	-	-	44	16	1	61	1.007	-	1.007
KAB. MANGGARAI TIMUR	1	-	76	26	1	103	1.100	1	1.101
KAB. SUMBA TENGAH	-	-	39	13	1	53	986	-	986
KAB. SUMBA BARAT DAYA	2	-	46	29	9	84	1.012	-	1.012
PROVINSI NTT	13		-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	26	-	4.903	715	144	5.762	73.126	271	73.397
TOTAL	26					5.762			73.397
Sumber : Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Prov. NTT									

Jumlah kepesertaan Jamsostek selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Jumlah peserta Jamsostek pada tahun 2018 sebanyak 3.215 perusahaan dengan tenaga kerja 53.245 orang, dan tahun 2020 bertambah menjadi 5.577 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 43.401 orang.

Program yang diikuti antara lain adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.6.3 dibawah ini.

TABEL 5.6.3.						
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)						
DI PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2020						
NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN TERDAFTAR	TK TERDAFTAR	KEPESERTAAN PROGRAM (ORANG)		
				JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)	JAMINAN KEMATIAN (JKM)	JAMINAN HARI TUA (JHT)
1	2018	3.215	53.245	53.245	53.245	53.245
2	2019	3.859	71.149	71.149	71.149	71.149
3	2020	5.577	43.401	43.401	43.401	43.401
Sumber: Diskopnakertrans Prov. NTT						

Jumlah santunan kecelakaan kerja yaang dibayarkan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp. 60,837,998,782,- untuk menyantuni tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 258 kasus kecelakaan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.6.4. dibawah ini.

TABEL 5.6.4.			
KECELAKAAN KERJA DAN SANTUNAN			
DI PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2020			
NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	SANTUNAN (Rp.)
1	2018	76	885.463.800
2	2019	110	1.316.966.693
3	2020	72	58.635.568.289
Sumber : Dinas Kopnakertrans Prov. NTT			

5.7. Ketransmigrasian

Pengertian Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi, sementara pengertian transmigrasi sendiri adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Selama tahun 2018 sampai dengan 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibangun sebanyak 14 lokasi transmigrasi dan telah menempatkan sebanyak 450 kepala keluarga atau 1.987 jiwa.

Jenis transmigrasi terdiri atas Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Transmigrasi Umum diselenggarakan oleh Pemerintah, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha sedangkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah.

Pola lain yang pernah dilaksanakan adalah pola penataan, yaitu suatu program yang bersifat membantu menata kembali permukiman yang sudah ada agar lebih teratur, lebih sehat, lebih cantik dan juga menjadi kawasan yang produktif.

TABEL 5.7.1										
PENGERAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI NTT										
TAHUN 2017-2019										
NO	DAERAH ASAL/UPT/KABUPATEN	JUMLAH ANIMO (KK)	JUMLAH PENDAFTAR (KK)	JUMLAH TERSELEKSI (KK)	DAERAH TUJUAN PENEMPATAN		JUMLAH PENEMPATAN		SUMBER DANA	KET
					PROVINSI	UPT/KABUPATEN	KK	JIWA		
TAHUN 2017										
1	UPT Sanabibi, Kab. Belu	50	50	50	NTT	UPT Sanabibi, Kab. Belu	50	207	APBN	TPS
2	UPT Ikiseogezu, Kab Nagekeo	50	50	50	NTT	UPT Ikiseogezu, Kab Nagekeo	50	182	APBN	TPS
JUMLAH TAHUN 2017		100	100	100			100	389		
TAHUN 2018										
1	UPT Peybulak, Kab. Belu	25	25	25	NTT	UPT Peybulak, Kab. Belu	25	119	APBN	TPS
2	UPT Uluklubuk, Kab. Malaka	25	25	25	NTT	UPT Uluklubuk, Kab. Malaka	25	100	APBN	TPS
3	UPT Remasingfui, Kab. Alor	25	25	25	NTT	UPT Remasingfui, Kab. Alor	25	111	APBN	TPS
4	UPT Yubuwai, Kab. Sumba Timur	30	30	30	NTT	UPT Yubuwai, Kab. Sumba Timur	30	54	APBN	TPS
5	UPT Palahonang, Kab. Sumba Timur	25	25	25	NTT	UPT Palahonang, Kab. Sumba Timur	25	94	APBN	TPS
6	UPT Wewaringi, Kab. Sumba Barat	25	25	25	NTT	UPT Wewaringi, Kab. Sumba Barat	25	123	APBN	TPS
JUMLAH TAHUN 2018		155	155	155			155	601		
TAHUN 2019										
1	Kab. Sikka	150	35	10	Sulawesi Barat	UPT Saluandeang, Kab. Mamuju	10	40	APBN	TPA
2	Provinsi Bali	10	10	6	NTT	UPT Kotakawau SP. 5, Kab. Sumba Timur	6	26	APBN	TPA
3	UPT Kapitan Meo Pugar, Kab. Malaka	25	25	25	NTT	UPT Kapitan Meo Pugar, Kab. Malaka	25	130	APBN	TPS
4	UPT Kapitan Meo Baru, Kab. Malaka	75	60		NTT	UPT Kapitan Meo Baru, Kab. Malaka	50	344	APBN	TPS
5	UPT Kotakawau SP. 7, Kab. Sumba Timur	75	75	75	NTT	UPT Kotakawau SP. 7, Kab. Sumba Timur	75	344	APBN	TPS
6	UPT Kotakawau SP. 5, Kab. Sumba Timur	35	35	29	NTT	UPT Kotakawau SP. 5, Kab. Sumba Timur	29	113	APBN	TPS
JUMLAH TAHUN 2019		370	240	145			195	997		
TOTAL		625	495	400			450	1.987		
Sumber: Bidang Ketransmigrasian Diskopnakertrans Provinsi NTT.										

Pada Tahun 2017 jumlah penempatan Transmigran Penduduk Setempat sebanyak 100 KK/389 jiwa, di UPT Sanabibi/Kabupaten Belu dan UPT Ikiseogezu/Kabupaten Nagekeo. Sedangkan pada tahun 2018 penempatan transmigran di Kabupaten Belu, Malaka, Alor, Sumba Timur dan Sumba Barat sebanyak 155 KK/601 jiwa.

Untuk tahun 2019 penempatan Transmigran Penduduk Setempat sebanyak 179 KK di Kabupaten Malaka dan Sumba Timur. Sedangkan penempatan Transmigran Penduduk Asal dari Kabupaten Sikka sebanyak 10 KK di Provinsi Sulawesi Barat dan 6 KK dari Provinsi Bali ke Kabupaten Sumba Timur. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.7.1 diatas.

TABEL 5.7.2																									
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI NTT																									
TAHUN 2017-2019																									
NO	LOKASI/UPT	TAHUN BINA	JUMLAH KK/JIWA	PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRASI						PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI														KET	
				PRODUKTIVITAS LAHAN			KELEMBAGAAN EKONOMI			BANTUAN PANGAN		JUMLAH TENAGA PEMBINA													
				PAKET A (paket)	PAKET B (paket)	PAKET C (paket)	JENIS USAHA	PEMBEN TUKAN (unit)	PENGEM BANGAN (unit)	BERAS (Kg)	NON BERAS (PAKET)	TENAGA PEMBINA UPT			TENAGA GURU			TENAGA KESEHATAN			ROHANIAWAN				
												L	P	JMH	L	P	JMH	L	P	JMH	L	P	JMH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
TAHUN 2017																									
1	UPT Sanabibi, Kab. Belu	2022	50 KK/203 jiwa	50	50	50	Tani	-	-	2.125	50	1	-	1	3	2	5	1	2	3	1	-	1		
2	UPT Ikiseo-Gezu, Kab. Nagekeo	2022	50 KK/150 jiwa	50	50	50	Tani	1 Kel. Tani	-	2.125	50	2	-	2	2	3	5	-	3	3	1	-	1		
JUMLAH TAHUN 2017			100 KK/353 jiwa	100	100	100					4.250	100	3	-	3	5	5	10	1	5	6	2	-	2	
TAHUN 2018																									
1	UPT Remasingfui, Kab. Alor	2023	25 KK/114 jiwa	25	25	-	Tani	-	-	1.075	25	2	-	2	1	3	4	1	3	4	-	1	1		
2	UPT Wewaringi, Kab. Sumba Barat	2023	25 KK/104 jiwa	25	25	-	Tani	-	-	1.075	25	3	-	3	1	4	5	-	3	3	1	-	1		
3	UPT Palahonang, Kab. Sumba Timur	2023	25 KK/116 jiwa	25	25	-	Tani	-	-	1.075	25	2	-	2	2	2	4	-	3	3	1	-	1		
4	UPT Kotakawau SP. 5, Kab. Sumba Timur	2023	30 KK/120 jiwa	30	30	-	Tani	-	-	1.290	30	2	-	2	3	2	5	2	1	3	-	1	1		
JUMLAH TAHUN 2018			105 KK/454 jiwa	105	105					4.515	105	9	-	9	7	11	18	3	10	13	2	2	4		
TAHUN 2019																									
1	UPT Kapitan Meo, Kab. Malaka	2024	75 KK/381 jiwa	75	-	-	Tani	-	-	3.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	UPT Kotakawau SP. 5, Kab. Sumba Timur	2023	35 KK/145 jiwa	35	-	-	Tani	-	-	1.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	UPT Kotakawau SP. 7, Kab. Sumba Timur	2024	75 KK/375 jiwa	75	-	-	Tani	-	-	3.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH TAHUN 2019			185 KK/901 jiwa	185	-	-					7.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL 2017-2019			390 KK/1.708 jiwa	390	205	100					16.720	205	12	-	12	12	16	28	4	15	19	4	2	6	
Sumber: Bidang Ketransmigrasian Diskoonakertrans Provinsi NTT.																									

Sumber: Bidang Ketransmigrasian Diskopnakertrans Provinsi NTT.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dilakukan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia transmigrasi.

Dari Tabel 5.7.2 dapat dilihat bahwa, pada tahun 2017 melalui usaha tani warga transmigran di UPT Sanabibi/Kabupaten Belu dan UPT Ikiseogezu/Kabupaten Nagekeo diberikan bantuan untuk peningkatan produktivitas lahan pertanian sebanyak 300 paket. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas SDM diberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 4.250 Kg dan bantuan non beras sebanyak 100 paket untuk 100 KK. Sedangkan pembina UPT berjumlah 3 orang, tenaga guru 10 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan rohaniawan 2 orang.

Tahun 2018 ada 4 UPT di Kabupaten Alor, Sumba Barat dan Sumba Timur dengan jumlah 105 KK yang mendapatkan bantuan sebanyak 210 paket untuk peningkatan produktivitas lahan pertanian. Selain itu juga mendapatkan bantuan pangan beras sebanyak 4.515 Kg dan non beras sebanyak 105 paket. Sedangkan pembina UPT berjumlah 9 orang, tenaga guru 18 orang, tenaga kesehatan 13 orang dan rohaniawan 4 orang.

Sedangkan tahun 2019 ada 3 UPT di Kabupaten Malaka dan Sumba Timur sebanyak 185 KK yang mendapatkan bantuan peningkatan produktivitas lahan sebanyak 185 paket dan bantuan pangan beras sebanyak 7.955 Kg.

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Buku Profil Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini disusun dalam rangka menyediakan data koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.